

**Analisis Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
Di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*****Analysis of the Implementation of Health Functional Competency Tests
at the South Sumatra Provincial Health Office*****Nerry Yudi Astuti¹⁾, Sri Sulastr^{2*)}, Konar Zuber³⁾**¹ Magister Ilmu Administrasi Publik STISIPOL Candradimuka, Indonesia² STISIPOL Candradimuka Indonesia³ STISIPOL Candradimuka Indonesia**E-mail correspondences: sri.sulastr²@stisipolcandradimuka.ac.id***ABSTRAK**

Pada penelitian yang berjudul Pelaksanaan Tes Tingkat Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumatera Selatan ditemukan permasalahan bahwa peserta tes tidak memahami cara evaluasi uji kompetensi dan peserta tes tidak memahami secara maksimal poin-poin fungsional dari tes, evaluasi portofolio, seperti kontrol, kontrol tugas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dianalisis dalam beberapa tahap yaitu, meringkas, menyajikan, menyimpulkan dan memeriksa dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Informasi dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Teknik pengendalian keabstrakan data dilakukan dengan memperpanjang waktu partisipasi, keteguhan observasi, triangulasi dan peer review, serta pembuatan referensi. Penelitian ini menggunakan teori Terry (2006) yang melihat empat faktor yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan: Pelaksanaan tes kompetensi fungsional tidak berhasil secara maksimal, meskipun didukung oleh pengelolaan anggaran pengembangan pegawai dalam pelaksanaan tes kemampuan kerja fungsional. Organisasi: Struktur dan pembagian kerja untuk penyelenggaraan tes kualifikasi pekerjaan fungsional tidak berjalan maksimal. Pelaksanaan: sesuai dengan rencana anggaran yang dibuat pada saat pelaksanaan anggaran. Pemantauan: tidak berjalan optimal karena landasan hukum panduan tugas tidak lengkap.

Kata kunci : Pelaksanaan, Uji Kompetensi, Jabatan Fungsional Kesehatan**ABSTRACT**

In the study entitled Implementation of Health Functional Level Tests at the South Sumatra District Health Office, it was found that the test takers did not understand how to evaluate competency tests and the test takers did not fully understand the functional points from the test portfolio evaluation, such as control, task control. This study used a qualitative descriptive method which was analyzed in several stages, namely, summarize, present, conclude and check with the South Sumatra Provincial Health Office. Information was collected through literature study, observation and interviews. Data abstraction control techniques are carried out by extending the time of participation, constancy of observation, triangulation and peer review, and making references. This study uses the theory of Terry (2006) which looks at four factors, namely: planning, organizing, implementing and controlling. Based on the results of the research, it is known that planning: Implementation of functional competency tests was not optimally successful, even though it was supported by management of the employee development budget in implementing functional work ability tests. Organization: The structure

and division of labor for the implementation of functional job qualification tests are not running optimally. Implementation: in accordance with the budget plan made at the time of budget execution. Monitoring: does not run optimally because the legal basis for task guidance is incomplete.

Keywords: *Implementation, Competency Test, Health Functional Position*

PENDAHULUAN

Tes bakat fungsi kesehatan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh tim peneliti untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tenaga kesehatan guna memenuhi persyaratan kenaikan pangkat ke jabatan yang lebih tinggi.

Perlunya tes kualifikasi untuk tugas-tugas fungsional didasarkan pada kenyataan bahwa bidang pekerjaan tugas fungsional cukup luas, membutuhkan penguasaan pengetahuan teoritis dasar lapangan dan, tergantung pada levelnya, membutuhkan pengetahuan khusus yang penting. pengetahuan khusus dalam bidang tertentu. Selain itu, perkembangan kebutuhan jenis pekerjaan atau bidang pekerjaan pada profesi fungsional di masa depan menuntut ketajaman mental khusus untuk keterampilan profesional yang sesuai dengan masing-masing profesi. Untuk mengetahui keterukuran keterampilan pada setiap jenjang, harus dilakukan uji kualifikasi (Permenkes 18/2017).

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan tes kualifikasi jabatan fungsional adalah dari perspektif penilaian portofolio, dimana komponen inti seperti sertifikat ketiadaan masih rendah berdasarkan kualifikasi yang akan dilalui, sedangkan komponen tambahan merupakan persyaratan wajib opsional yang tidak dapat dilakukan. . diperoleh . untuk penyelesaian, seperti sertifikat pendidikan, pengembangan profesi dan berbagai penghargaan yang relevan di bidang kesehatan. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan profesional tenaga kesehatan

perlu dilakukan uji kompetensi untuk tugas kesehatan; dan masih banyak peserta uji kompetensi yang belum memahami nilai portofolio untuk setiap jabatan fungsional, peserta ujian belum memahami metode evaluasi ujian berdasarkan Permenpan RB No. 13 Tahun 2019 bahwa kenaikan jabatan fungsional adalah Lulus uji kompetensi wajib meningkat. kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan dan kami juga bertemu dengan peserta yang tidak memahami metode penilaian tes keterampilan, termasuk MVAT. M artinya cukup artinya jumlah dokumen sesuai dengan tujuan kompensasi, V artinya valid artinya tanda tangan pimpinan langsung dan stempel basah lembaga/unit kerja, A artinya asli artinya asli bukti dari portofolio. laporan yang disampaikan kepada inspektur T berarti terkini, yang berarti dokumen, sekurang-kurangnya dua tahun terakhir.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Analisis Pelaksanaan Tes Tingkat Fungsional Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan”.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah seperti:

1. Peserta tes tidak memahami metode penilaian tes keterampilan
2. Penguji belum memahami secara maksimal definisi fungsional dari unit-unit fungsional penilaian portofolio, seperti audit, pengendalian tugas.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah adalah “Bagaimana pelaksanaan tes kemampuan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumatera Selatan?”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Uji Kompetensi Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumatera Selatan.

Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu sosial budaya, memahami manajemen personalia khususnya ilmu administrasi yang diharapkan menjadi informasi dan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen G.R. Terry adalah suatu proses yang khas dari perencanaan, pengorganisasian, penggalangan dan pengarahan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber lainnya (Hasibuan, 2001: 3). Menurut Amirullah (2015: 8), fungsi manajemen secara umum dibagi menjadi empat fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses pembentukan dan penetapan tujuan dan sasaran yang disepakati bersama dalam langkah-langkah strategis untuk mencapai visi dan misi yang ada. Melalui rencana, manajer mendapatkan gambaran yang diinginkan untuk mengimplementasikan proses. Perencanaan adalah proses mempersiapkan dan menetapkan tujuan dan cara untuk mencapainya, atau proses menentukan ke mana Anda akan pergi dan bagaimana Anda akan mencapai tujuan tersebut. Sasaran (goals) adalah hasil tertentu yang dicapai seseorang. Selain "goal", istilah lain yang bisa digunakan adalah "goal".

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses mengkoordinasikan segala cara untuk melaksanakan rencana yang dibuat oleh individu atau kelompok dengan mengkoordinasikan setiap individu atau kelompok kegiatan yang telah disepakati. Organisasi adalah tugas apa yang dilakukan, siapa yang melakukannya, bagaimana tugas dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan kapan serta di mana keputusan dibuat.

3. Implementasi

Eksekusi adalah tindakan atau pelaksanaan rencana terperinci, biasanya dilakukan setelah rencana dibaca sampai selesai. Secara sederhana, aplikasi dapat diartikan sebagai aplikasi. Majone dan Wildavsky merekomendasikan untuk meminta evaluasi. Browne dan Wildavsky berpendapat bahwa implementasi adalah perpanjangan dari aktivitas yang saling beradaptasi. Nurdin Usman. (2002:70).

4. Tinjauan

Mengontrol kegiatan agar kegiatan tetap sejalan dengan visi dan misi yang telah disepakati dan menjaga kualitas atau tingkat prestasi kerja karyawan untuk tindakan perbaikan jika diperlukan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, tindakan dan lain-lain

Teori yang digunakan dalam mengaplikasikan penelitian ini adalah dengan teori Terry (2006) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing*

(Pengorganisasian), *Actuating*
(Pelaksanaan / Penggerakan) dan
Controlling (Pengawasan)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Berdasarkan analisis dan hasil wawancara sebelumnya yang telah dilakukan menunjukkan bahwa maksud dan tujuan kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang menjadi acuan kerja.

A. Butuh rencana

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang dilakukan, ternyata persiapan yang diperlukan disosialisasikan dan dikoordinasikan dalam rencana persyaratan tes kualifikasi yaitu. a) maksud dan tujuan tes, peserta, penyelenggara tes, kelompok tes, materi tes, metode tes, tempat dan waktu pelaksanaan; b) tugas dan tanggung jawab setiap unsur dalam penyelenggaraan ujian kualifikasi jabatan fungsional; dan c) mekanisme penegakan. Dalam materi uji kompetensi tugas-tugas kesehatan mengacu pada poin-poin kinerja tingkat tugas dan tingkat kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode uji kompetensi dapat berupa portofolio, tes tertulis, tes lisan dan tes praktik. Tes portofolio adalah metode wajib untuk lulus tes kecakapan. Namun untuk metode tes tertulis, ada yang memilih tes lisan atau tes praktik.

B. Sumber daya manusia

Berdasarkan analisis dan hasil wawancara sebelumnya, terlihat adanya rencana anggaran khusus biaya personel dalam pemeriksaan

kualifikasi tugas fungsi kesehatan KPU Kabupaten Sumsel yang belum terlaksana. optimal karena tidak mempertimbangkan unsur peraturan dan pedoman dalam fungsi desain. Selain itu, persiapannya kurang tersosialisasi dan terkoordinir dengan baik, sehingga masih ada tenaga kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan uji kompetensi jantung, selain itu tenaga kesehatan pada akhirnya kurang memahami materi untuk melakukan aktivitas fungsional. tes kompetensi untuk posisi tersebut, seperti memeriksa kerangka administrasi. Padahal, dengan anggaran sebesar itu, kami bertujuan untuk mempertahankan panduan teknis untuk mengembangkan tenaga kesehatan yang tidak memahami evaluasi kerangka administrasi nanti dalam pelaksanaan tes jantung.

C. Maksud dan tujuan kegiatan

Unsur Ini menentukan arah di mana operasi ini dilakukan. Fungsi pelaksanaan kompetensi fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumsel sudah tercantum dalam program administrasi mengacu pada tugas pelaksanaan uji kompetensi fungsional kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumsel.

(a) sarana dan prasarana

Unsur ketiga dalam pelaksanaan fungsi perencanaan adalah wilayah dan sarana prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Fungsional Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumsel. Ini menyelesaikan Tes Operasi Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, yang merupakan bagian dari program. Dari hasil wawancara di atas, jelas bahwa sarana dan prasarana yang layak seperti tempat, lokasi uji kompetensi, peralatan IT dll diperlukan untuk melakukan tes bakat.

2. organisasi

a) Struktur organisasi

Unsur pertama pengorganisasian adalah menentukan siapa yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Sertakan semua yang Anda lihat, biasanya menugaskan tim untuk menyelesaikan aktivitas. Hal ini penting dilakukan dengan cara yang jelas, relevan dan terarah dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara, terlihat bahwa Kementerian Kesehatan terlibat langsung dalam pelaksanaan uji keterampilan tersebut.

D. Pembagian Tugas

Sebelum evaluasi tes kualifikasi dan kenaikan jabatan, motivasi ditunjukkan dengan memotivasi pegawai yang mengurus dokumen untuk menerima reward yang diambil APBD sesuai kinerja tes kualifikasi sesuai Permenkes 18 Tahun 2017. Berdasarkan Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang dilakukan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pembentukan tim sesuai dengan peraturan telah dilakukan, tetapi semua tugas dan tanggung jawab tim tidak jelas. Komunikasi dilakukan melalui koordinasi antar tim. Setiap tim saling berkoordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Penerapan

a) Instruksi aplikasi teknis

Unsur pertama aplikasi adalah petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan uji kompetensi jabatan fungsional. Kegiatan tersebut harus memiliki petunjuk teknis untuk melakukan uji keterampilan selama pelaksanaan kegiatan. Tujuannya untuk mengarahkan dan mengatur kegiatan yang akan dilakukan, agar tidak menyimpang dari perencanaan kegiatan yang akan dilakukan.

Tata cara pelaksanaan kegiatan tercantum dalam buku pedoman

disiplin (manual). Dimulai dengan mengajukan uji kesesuaian jabatan fungsional. Hal ini memudahkan profesional kesehatan untuk melihat cara menggunakannya dan cara mengaksesnya sendiri, serta melihat kelayakan pengiriman peserta potensial.

b) Persyaratan uji kualifikasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, dimana uji kualifikasi tenaga kesehatan didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017, dan juga didukung oleh Peraturan Menteri Administrasi. dan Reformasi Birokrasi no. 13 Keputusan tentang promosi tugas kesehatan masyarakat mulai 2019

2. Tinjauan

a) Pemantauan dan evaluasi

Dalam pemantauan, perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk pemantauan yang penting. Dengan evaluasi yang dilakukan setiap bulan atau tahun, yang memberikan gambaran apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau belum. Berkaitan dengan manajemen pelaksanaan Uji Kompetensi Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan, diadakan rapat evaluasi setiap ada kendala dalam peningkatan dan peningkatan pelayanan dan kualitas tenaga yang baik, apalagi di pelaksanaan program Kesehatan. Uji Kompetensi Fungsional di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

b) Laporan hasil

Dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi Operasional Sumsel mengacu pada landasan hukum yang tercantum dalam Task Description (TAC) yang memuat pengawasan kegiatan manajemen sebagai landasan hukum. Tentang pelaksanaan Ujian

Jenjang Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan analisis dan hasil wawancara sebelumnya, nampaknya pelaksanaan tes fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan masih belum optimal karena peraturan dan perundang-undangan masih belum lengkap pembandingnya. kegiatan pengelolaan sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi standar dasar pengawasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada pembahasan Bab IV dan V, dapat disimpulkan bahwa analisis pelaksanaan uji kualifikasi jabatan fungsional KPU Kabupaten Sumsel belum berjalan dengan baik. Dalam hal ini merujuk pada indikator-indikator yang dikemukakan oleh George R. Terry sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kompetensi fungsional belum berjalan secara optimal, meskipun didukung oleh pengelolaan anggaran kepegawaian selama pelaksanaan kompetensi fungsional. Perencanaan tes kualifikasi untuk jabatan fungsional kurang ruang lingkup dan koordinasi, sehingga ada tenaga kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan untuk lulus tes kualifikasi, selain itu, tenaga kesehatan tidak memahami materi untuk lulus tes kualifikasi. melakukan uji kualifikasi jabatan fungsional, seperti pemeriksaan kerangka administrasi.

2. Pengorganisasian

Mengenai struktur organisasi dan pembagian kerja pada uji level fungsional, operasional tidak berjalan maksimal. Pembentukan tim Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel ditunda. Dan dengan peralihan tersebut, banyak layanan yang tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel. Selain itu, pengaturan

pembentukan tim pengembang tidak mencantumkan tugas dan tanggung jawab, sehingga tidak ada kejelasan tugas dan tanggung jawab tim. Meskipun hal ini memang diperlukan untuk pembagian tanggung jawab dan tugas yang jelas antara anggota tim audit. 3. Implementasi Pelaksanaan tes kualifikasi postur fungsional tetap berjalan optimal. Hal ini karena pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun. Itu sebabnya Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel mendapat penghargaan atas kinerjanya

4. Kontrol

Pengawasan uji kompetensi fungsional tidak berjalan maksimal, karena landasan hukum dari manual tugas tidak lengkap. Meskipun evaluasi manajemen uji kompetensi fungsional yang terdiri dari rapat review pengembangan, laporan kinerja dan pengawasan (monitoring) berjalan dengan baik. Namun belum dapat mendukung seluruh indikator dimensi pengawasan, sehingga uji kompetensi fungsional Kemenkes Provinsi Sumsel belum dapat dikatakan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armstrong, M. 1997. *A Handbook of Personnel Management Practice- 6th Edition*. London: Kogan Dage.
- Bungin, Burhan Fuji. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Press. Jakarta
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan*
- Hasan M. Iqbal. 2002. *Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia (Anggota IKAPI). Yogyakarta.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 2014. *Analisis Data*

- Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Moleong, Lexy. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja
- Nursalam & Ferry, Efendi. (2008). *Pendidikan dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika
- Permenkes nomor 1796 tahun 2011. *Registrasi Tenaga Kesehatan*. Jakarta
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif*
- George Terry. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen* Jakarta. Bina Aksara
- PPNI. (2009). *Standar Profesi Perawat Indonesia*. Jakarta
- Presiden Republik Indonesia. (2012). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Jurnal Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan Indonesia*, Vol. 2, No. 1
- Septiari, B. B. (2014). *Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI)*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38. (2014). *Tentang Keperawatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5612*
- Wirawan. 2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Prihatiningsih, Titi Savitri. (2007). *Strategi Analisis Data Kualitatif untuk Penelitian Pendidikan Kedokteran & Profesi Kesehatan*.